

**SUBSISTENSI BUDAYA: STRATEGI SURVIVAL
MASYARAKAT TERDAMPAK KEBIJAKAN SOCIAL
DISTANCING DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA**

***CULTURAL SUBSISTENCE: SURVIVAL STRATEGY OF
PEOPLE AFFECTED BY SOCIAL DISTANCING POLICY ON
INDONESIA-MALAYSIA BORDER***

Pabali Musa¹, Adi Suryadi², Rizqi Ratna Paramitha³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura,
Jl. Ahmad Yani Kota Pontianak - Indonesia

¹Email korespondensi: pabali1962@gmail.com

Diterima: 30 Desember 2020; Direvisi: 21 Juni 2021; Disetujui: 22 Juni 2021

Copyright © 2021 The Author



This is an open access article
under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite (APA): Musa, P., Suryadi, A., Paramitha, R. R. (2021). Subsistensi budaya: strategi survival masyarakat terdampak kebijakan *social distancing* di perbatasan Indonesia-Malaysia. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 10(2), 212–226. <https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v10i2.1070>

ABSTRACT

This research is intended to reveal the survival strategy of communities affected by the social distancing policy in border areas, especially Sambas Regency. The study was conducted using qualitative method, and field data collection with interviews and field observations (observations). The goal was to be able to explain the object of research intensively and precisely, namely the survival strategy taken by people on Sambas region border in facing pandemic, especially with their local culture. The subjects of research were Sambas people, especially workers, both local and migrant workers, as well as several related stakeholders. The results of study indicate that the survival strategy taken is a subsistence approach, generally manifested into: (1) subsistence bonds, in the form of forming and maintaining communal cohesiveness and kinship, (2) subsistence ethics, which is strengthening helpful behavior or solidarity, and (3) subsistence production in the form of productivity in the consumptive sector, the result of which is for their own use.

Keywords: *cultural subsistence, survival strategy, policy impact*

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan strategi survival masyarakat terdampak kebijakan *social distancing* di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Sambas. Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dan pengumpulan data lapangan dengan wawancara dan

pengamatan lapangan (observasi). Tujuannya agar dapat menjelaskan secara intensif dan tepat tentang objek penelitian yaitu strategi survival masyarakat di wilayah perbatasan Sambas dalam menghadapi pandemi, terkhusus dengan budaya lokal yang mereka miliki. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Sambas, khususnya para buruh, baik buruh lokal maupun buruh migran, serta beberapa pihak terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi untuk dapat bertahan hidup (*survival*) yang masyarakat gunakan adalah dengan pendekatan subsistensi, yang umumnya berbentuk: (1) ikatan subsistensi, berupa membentuk dan mempertahankan kohesivitas komunal dan kekerabatan, (2) etika subsistensi, yaitu menguatkan perilaku tolong-menolong atau solidieritas, dan (3) produksi subsistensi dalam bentuk produktifitas di bidang konsumtif yang hasilnya untuk dipakai sendiri.

Kata kunci: subsistensi budaya, strategi survival, dampak kebijakan

PENDAHULUAN

Sebagai wilayah yang berbatasan dengan Negara Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat tentunya memiliki kondisi khusus serta kebijakan yang spesifik dalam situasi tertentu. Berkenaan dengan pandemi COVID-19, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat membuat instruksi resmi penutupan perbatasan negara melalui Surat Perintah Nomor 193/0868/BPPD-A tertanggal 18 Maret 2020. Surat penutupan pintu perbatasan yang bersifat penting itu, ditujukan kepada Bupati yang wilayahnya memiliki garis perbatasan dan akses ke Malaysia, yaitu Sambas, Bengkayang, Sanggau, Kapuas Hulu, Sintang, serta juga ke Administrator Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Sanggau, Administrator PLBN Nanga Badau di Kapuas Hulu, dan Administrator PLBN Aruk di Sambas (Okezone.com, 2020).

Semua lapisan masyarakat di Kalimantan Barat terdampak COVID-19, termasuk di wilayah pedesaan perbatasan, yang mana masyarakat adat menghadapi kerentanan miskin dan keterbatasan stok pangan (Niko, 2021). Penutupan pintu perbatasan ini diambil sebagai kebijakan antisipasi mengimbangi keputusan Pemerintah Negara Malaysia yang sebelumnya telah memberlakukan kebijakan pembatasan ketat (*lockdown*) bagi warganya di Serawak karena peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi di Malaysia.

Kebijakan ini meniadakan akses bagi semua orang yang akan masuk ke Kalimantan Barat. Pelayanan hanya diberikan bagi warga negara asing yang akan keluar dari wilayah Kalimantan Barat dan atau sebaliknya.

Akibat dari dua kebijakan tersebut, adalah tertutupnya akses manusia dan interaksi sosial ekonomi dari dan ke Kalimantan Barat – Serawak. Dampaknya tentu saja beragam, diantaranya adalah berkurangnya stok pemenuhan kebutuhan hidup di daerah perbatasan yang masih belum dapat dipenuhi dari dalam negeri melainkan sangat bergantung kepada suplai dari negara tetangga. Fenomena ini terlihat dengan langkanya beberapa kebutuhan pokok masyarakat di pertokoan dan bahkan di minimarket (Antara News Kalbar, 2020).

Selain masalah akses dan distribusi stok pangan di wilayah perbatasan, Kalimantan Barat memiliki persoalan lain yaitu banyaknya tenaga kerja (TKI), baik resmi/legal maupun yang tidak resmi/illegal yang berasal dari provinsi ini di wilayah Serawak, Malaysia. Kemudian, adanya edaran resmi pemerintah Provinsi Kalbar yang menolak Kalimantan Barat dijadikan tempat transit pemulangan TKI dari Malaysia yang berasal dari luar Kalimantan Barat (Pontianak Post, 2020). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini secara spesifik untuk mengetahui bagaimana strategi

masyarakat perbatasan mampu *survive* (bertahan hidup) di tengah-tengah kebijakan penutupan wilayah batas negara.

Pembangunan perbatasan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan nasional. Secara umum, pembangunan nasional adalah meliputi: pertumbuhan ekonomi (*economy growth*) yang mengacu kepada “wirausaha”, perawatan masyarakat (*community care*) dalam bentuk merawat dan melindungi warga negara dari risiko dan ancaman kehidupannya, dan pengembangan manusia (*human development*) yang mengarah pada peningkatan kualitas atau kompetensi sumber daya manusia (Suharto, 2009). Dengan demikian, tugas Pemerintah dalam pembangunan adalah memajukan rakyat dalam hal kehidupan perekonomiannya, menjaga rakyat dari hal-hal yang negatif dan yang akan merusaknya, serta meningkatkan kemampuan ketrampilan dan pengetahuan rakyat.

Perbatasan negara merupakan kawasan/wilayah terluar negara yang berhimpitan dengan wilayah negara lain. Menurut Hadi (2017) isu strategis perbatasan Indonesia adalah berkenaan dengan beberapa hal berikut ini: 1) lambannya pertumbuhan ekonomi dan minimnya pelayanan sosial dasar; 2) minimnya ketersediaan energi; 3) keterisolasian karena minimnya infrastruktur dasar; 4) minimnya akses telekomunikasi untuk warga perbatasan; 5) belum efektifnya pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional; 6) banyaknya aktifitas ilegal karena minimnya pengamanan; dan 7) pengelolaan perbatasan masih mementingkan ego sektoral.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pada umumnya kawasan perbatasan negara, khususnya di wilayah perbatasan darat, Kalimantan Barat masih relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah yang bukan perbatasan. Niko (2017) menyebutkan bahwa karena tertinggalnya SDM

di wilayah perbatasan, memungkinkan terjadinya perdagangan ilegal terjadi. Hajad dasar masyarakatnya masih belum terpenuhi secara baik. Pengelolaannya masih belum terkoordinasi dengan memadai. Sehingga ada celah untuk masuknya berbagai tindak dan perilaku negatif yang keluar/masuk dari negara tetangga, terlebih lagi dibangunnya infrastruktur terminal barang internasional yang tidak disertai dengan perbaikan SDM akan memungkinkan masyarakat lokal perbatasan akan tertinggal (Niko & Samkamarina, 2019).

Landasan kebijakan pembangunan perbatasan tertuang dalam berbagai regulasi yang sudah memasuki rentang waktu lebih dari sepuluh tahun ini. Beberapa landasan kebijakan ini dapat dikemukakan sebagai berikut (Hadi, 2017):

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 Tentang: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menegaskan arah kebijakan pembangunan perbatasan yang *outward looking*;
2. Undang-undang No. 2006 Tahun 2007 Tentang: Penataan Ruang Wilayah Nasional mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara;
3. Undang-undang No. 43 Tahun 2008 yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan;
4. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang: Penetapan Kawasan Perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional;
5. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan Pemerintah Pusat memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan kawasan perbatasan;
6. Peraturan Presiden Tentang: Rencana Tata Ruang Kantor Pertanahan Nasional, yaitu Perpres No. 179/2014, Perpres No.31/2015, Perpres N0. 32/2015, Perpres No. 33/2015, dan Perpres No. 34/2015.

7. Nawacita Presiden Joko Widodo, diantaranya berkenaan dengan pemerataan pembangunan antar wilayah terutama desa, Kawasan Timur Indonesia, dan Kawasan Perbatasan.
8. Perpres No. 2 Tahun 2016 berkenaan dengan mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan. Diiringi dengan penetapan 10 Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).
9. Perpres No. 6 Tahun 2016 mengenai prioritas pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara yaitu: Aruk, Entikong, Badau, Wini, Mota`ain, Motamasin, dan Skouw.
10. Perpres No. 3 Tahun 2016 mengenai pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.

Berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah perbatasan tersebut, maka kita tidak meragukan lagi akses ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi bagi masyarakat perbatasan. Sehingga memungkinkan mereka untuk tetap bertahan kokoh di masa pandemi atau bencana lainnya. Namun fakta yang terjadi, pembangunan wilayah batas negara masih belum menyeluruh dan merata dalam setiap lapisan masyarakat. Adanya gap pembangunan ini yang menyebabkan ekonomi masyarakat golongan bawah hampir tidak sanggup menghadapi situasi pandemi dan kebijakan penutupan akses wilayah perbatasan.

Kemudian, landasan kebijakan pembangunan perbatasan sebagaimana tersebut di atas, dispesifikasi ke arah kebijakan pembangunan perbatasan. Adapun arah kebijakannya mencakup tiga aspek utama menurut Hadi (2017), yaitu: a) pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan; b) peningkatan keamanan wilayah perbatasan sebagai

halaman depan negara (*security approach*); dan c) peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan melalui peningkatan penyediaan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi (*prosperity approach*). Berdasarkan situasi perkembangan pembangunan perbatasan yang diuraikan, maka terdapat *gap* pembangunan yang memungkinkan terjadinya dampak langsung dan tidak langsung atas kebijakan penutupan perbatasan bagi masyarakat lokal di Kabupaten Sambas. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menguraikan strategi mereka dalam menghadapi situasi pandemi, dimana jalur perbatasan tutup total dan dilarang melakukan aktivitas keluar masuk Malaysia-Indonesia.

Strategi bermakna ilmu siasat perang, akal atau tipu muslihat untuk mencapai sesuatu maksud dan tujuan yang telah direncanakan (Anwar, 2002). Banyak bentuk atau formulasi strategi dalam upaya untuk bertahan hidup. Menurut George Mead; rangsangan dan tanggapan merupakan awal dari tindakan yang lebih diidentikkan sebagai upaya untuk bertahan dari kondisi-kondisi tertentu (Ritzer, 2012). Dengan demikian, dalam menerapkan strategi bertahan hidup, setiap manusia mempunyai respon yang berbeda, pada umumnya mereka melakukan tindakan rasional, yaitu sesuatu cara yang diperhitungkan untuk memperbesar kesenangan dan menghindari penderitaan.

Satu diantara berbagai strategi yang digunakan untuk dapat bertahan hidup adalah subsistensi. Subsistensi secara sederhana berarti pola atau cara hidup yang sangat bersahaja, yaitu melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk sekedar dapat bertahan hidup. Istilah lainnya yang digunakan adalah subsistensi hidup, yaitu yang berkaitan dengan tingkat kehidupan yang bersifat minimal hanya untuk sekedar hidup. Menurut Scott (1981) subsistensi adalah

suatu pola khusus yang terbentuk pada masyarakat petani di Asia Tenggara. Ia adalah suatu pola khas yang terbentuk di dalam masyarakat Asia Tenggara sebagai upaya bertahan hidup dengan membentuk jaringan-jaringan sosial dengan mengandalkan ikatan komunal dan hubungan *patron-klien*.

Secara garis besar, dalam melakukan strategi survival setiap individu berbeda, mereka berusaha mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dengan memanfaatkan sumber-sumber lain. Ketika sumber daya lain tidak mampu mencukupi, maka mereka akan Mengencangkan ikat pinggang dengan jalan mengatur pola makan sehari dua kali, sehari sekali dan mengganti makanan dengan mutu yang lebih rendah. Akan tetapi ketika situasi sulit berjalan berlarut-larut, maka mereka melakukan strategi alternatif yaitu dengan mengembangkan etika subsistensi yang didasarkan pada ikatan komunal. Scott (1981) menyimpulkan bahwa ikatan komunal begitu kuat terjalin di dalam masyarakat desa, yang menumbuhkan nilai-nilai sosial yang mengukuhkan semangat kegotong-royongan antar warga desa yang diikat oleh sistem kekerabatan.

Hal senada juga diungkapkan oleh beberapa peneliti yang mengkaji tentang strategi survival masyarakat miskin di Asia khususnya Jawa sebagaimana dinyatakan oleh Booke, bahwa ikatan komunal masih kuat di dalam masyarakat tradisional (Geertz, 1982; 1992). Dalam hal ini bahwa pendekatan moral ekonomi subsistensi, tolong menolong sebagai bagian dari strategi bertahan hidup *peasant* di Jawa (Bremen dan Windardi, 2002). Kemudian, terkait strategi paisan di Cikalong menghadapi kemiskinan menyimpulkan bahwa etika subsistensi dan hubungan *patron-klien* masih mewarnai kehidupan masyarakat miskin, khususnya petani di Jawa sebagai

salah satu cara untuk bertahan hidup (Marzali, 2003).

Keterbatasan akses terhadap ekonomi, baik itu akses pekerjaan atau pengelolaan lahan untuk bertahan hidup, memaksa para buruh migran untuk dapat menempuh strategi-strategi yang mengkondisikan mereka untuk tetap bertahan hidup. Hal ini yang menurut Bradley et al (1990) yang menyebutkan bahwa subsistensi budaya akan diikuti oleh adanya subsistensi ekonomi. Namun ada hal yang berbeda pada masyarakat pertanian di pedesaan Jawa pada masa krisis akhir 1990-an, misalnya dilihat dari mekanisme jaring pengaman sosial yang dibentuk oleh masyarakat dengan prinsip kegotong-royongan (Bremen & Windardi, 2002).

Artinya disini bahwa hubungan *patron-klien* sudah mulai luntur di dalam masyarakat desa, yang terjadi adalah kewajiban untuk saling membantu antar tetangga. Hal ini terjadi karena adanya sistem diversifikasi ekonomi pertanian dan meningkatnya orientasi pada dunia luar yang berorientasi pada ekonomi dan modernitas di lingkungan masyarakat desa, yang telah termonetisasi sama seperti kehidupan masyarakat kota. Ini berdampak pada gaya dan hakekat, hubungan sosial memiliki ciri kontraktual tertentu, dan transaksi keuangan memainkan peran sentral dalam menata jaringan sosial (Bremen dan Windardi, 2002). Oleh karena itu, mekanisme jaringan sosial yang di dalam masyarakat desa saat ini tidak bisa diandalkan, untuk bertahan hidup, buruh dan keluarganya mengandalkan diri sendiri dan anggota keluarga mereka dengan bertumpu pada sektor informal.

Kajian mengenai tema strategi survival dengan objek kajian petani maupun buruh di Indonesia, telah banyak dilakukan oleh beberapa ahli baik dari dalam maupun luar negeri, sejak zaman kolonial hingga sekarang. Berbagai penelitian

tersebut telah menghasilkan beragam intepretasi dan kesimpulan, dikarenakan perbedaan antara lain; pertama, lokasi dan fokus penelitian. kedua, pendekatan, metode dan strategi dalam analisis data penelitian, dan ketiga. teori yang digunakan sebagai pijakan penelitian.

Terkait dengan konteks penelitian ini, ditampilkan beberapa penelitian yang membahas tentang strategi survival. Penelitian Sahryzal (1996) tentang strategi buruh perkebunan mengatasi kemiskinan, studi di perkebunan teh Mitra Kerinci di Desa Sungai Lembai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Sumatra Barat, mengkaji kehidupan buruh perkebunan teh, dengan melihat dari sudut pandang rumah tangga buruh sebagai subjek kajian, faktor kemiskinan keluarga buruh menjadi latar belakang penelitian ini, terkait dengan strategi survival buruh perkebunan bertahan hidup.

Studi lain dilakukan oleh Bremen (1988; 1990) terkait dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia dimana terdapat ribuan buruh yang bekerja di bidang industri dan kontsruksi mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), berdampak pada sektor informal. Para buruh yang bekerja di bidang transportasi, perdagangan, dan cabang ekonomi lain kehilangan pekerjaan, menyebabkan terjadinya *de-urbanisasi* dari kota ke desa. Penelitian Bremen ini lebih dititikberatkan pada kehidupan buruh pertanian pedesaan yang bekerja di kota sebagai buruh *penglaju*. Kehidupan buruh sebelum terjadinya krisis sudah sulit untuk mencari nafkah di sektor pertanian di desa, sehingga mereka terpaksa mengembara dan melaju ke perkotaan sampai ke Jakarta. Sebagian besar buruh *penglaju* bekerja di sektor konstruksi sebagai kuli bangunan, maka dengan adanya krisis moneter mereka terpaksa kehilangan pekerjaannya untuk waktu yang tidak ditentukan dan terpaksa kembali ke desa (*de-urbanisasi*), semen-

tara itu di desa ketersediaan lapangan pekerjaan sangat sempit dan mereka terpaksa menganggur untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

Penelitian lain terkait strategi masyarakat pertanian di Jawa antara lain oleh Marzali (2003) terkait strategi survival petani Cikalong dalam menghadapi kemiskinan. Strategi yang dilakukan oleh petani miskin di Cikalong menghadapi kemiskinan yaitu dengan bergantung pada mekanisme jaringan sosial yang didasarkan pada ikatan komunal yang terbentuk antar warga masyarakat Cikalong. Etika subsistensi, gotong royong, hubungan *patron klien* sebagai sistem ekonomi tradisonal sebagai penjamin kelangsungan hidup buruh tani miskin di Desa Cikalong.

Merujuk kepada respon dan strategi bertahan hidup buruh perkebunan berdasarkan referensi di atas, menjadi acuan dan inspirasi dalam penelitian ini. Secara umum penelitian ini memiliki kesamaan dan juga ada perbedaan tentang kehidupan buruh untuk bertahan dari krisis, yaitu dengan etika subsistensi, melalui hubungan *patron-klien*. Studi Rupita (2021) menyebutkan bahwa relasi sosial antar kelompok masyarakat di pedesaan Kalimantan Barat menjadi modal sosial lokal dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Dalam penelitian ini lebih menekankan pada strategi survival buruh, baik buruh lokal maupun buruh migran di daerah perbatasan tentunya berdasarkan latar belakang sosio-kultural dan kondisi geografis serta potensi lingkungan yang spesifik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Istilah “deskriptif” sendiri berasal dari istilah bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan se-

suatu hal. Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Dalam tulisan ini, data primer didapatkan melalui wawancara dan observasi lapangan.

Observasi dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan (memakai masker, menyiapkan hand sanitizer). Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di perbatasan Kabupaten Sambas yang dipilih secara random sampling. Informan berjumlah 6 orang, terdiri atas 2 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Pemilihan informan berdasarkan jarak lokasi dengan wilayah perbatasan ke Malaysia dan pejabat daerah setempat. Karakteristik informan sebagai berikut:

Tabel 1. Karakteristik Informan

No.	Inisial Informan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan
1.	DF	32	Perempuan	Tamat SD
2.	ST	41	Laki-laki	Tamat SMP
3.	WA	38	Laki-laki	Tamat SD
4.	DH	35	Laki-laki	Tamat S1
5.	JL	37	Perempuan	Tamat SD
6.	KT	42	Laki-laki	Tamat SD

Sumber: Peneliti, 2021

Wawancara dilakukan dengan cara bertatap muka dengan informan untuk mendapatkan penjelasan mengenai strategi survival yang mereka lakukan selama masa pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan dengan tetap menjaga jarak dan memakai masker serta menyediakan handsanitizer. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi Masyarakat Perbatasan Menghadapi COVID-19

Siasat agar dapat bertahan hidup serta untuk dapat meminimalisasi dampak dari kebijakan penutupan tapal batas bagi masyarakat perbatasan, khususnya para buruh di Sambas adalah dengan

subsistensi (subsistensi hidup). Secara umum terdapat tiga bentuk subsistensi hidup yang mereka lakukan, yaitu: ikatan subsistensi, etika/moral subsistensi, dan produksi subsistensi. Adanya subsistensi ini dimungkinkan karena terjadinya krisis pangan yang melanda di wilayah perbatasan (Atem & Niko, 2020), bahkan sebelum adanya wabah Covid-19.

Berdasarkan penjelasan dari Camat Sambas yang menyatakan bahwa terdapat cukup banyak faktor yang memungkinkan bagi masyarakat perbatasan untuk dapat melakukan subsistensi hidup terutama yang berdasarkan budaya, lingkungan alam, serta keyakinan atau kepercayaan yang mereka pegang dalam bermasyarakat.

“Semua ini menjadi modal utama mereka untuk melakukan subsistensi hidup. Berbagai pola yang mereka lakukan, tentunya sangat terkait dengan latar belakang, kualitas sumber daya, dan kondisi lingkungan mereka, yang intinya adalah bersifat budaya yaitu: kekeluargaan, tolong-menolong, berusaha keras, dan pengendalian diri dengan pola hidup prihatin”. (Hasil Wawancara 20/9/2020).

Untuk melakukan survival, masyarakat lebih banyak mengumpulkan kekuatan komunitas, yaitu gotong royong dalam memenuhi berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan pangan. Hal ini senada dengan hasil penelitian Sahryzal (1996) yang menyebutkan bahwa strategi bertahan hidup buruh perkebunan menerapkan strategi survival yaitu dengan melakukan usaha produksi subsistensi, melakukan pekerjaan tambahan, menekan pengeluaran rumah tangga, berhitung di warung, membentuk jaringan sosial, membatasi jumlah anak dan strategi masa depan.

Artinya bahwa masyarakat di perbatasan Sambas yang bekerja sebagai buruh di wilayah Malaysia, bukanlah masyarakat yang pasif sehingga mereka tidak berinovasi dalam komunitas. Arti-

nya bahwa masyarakat perkebunan bukanlah masyarakat yang pasif menerima keadaan, mereka mempunyai keinginan untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan bekerja keras, menyisihkan pendapatan mereka untuk ditabung, dengan tabungan mereka merencanakan strategi masa depan yang lebih baik (Sahryzal, 1996). Hal ini ditegaskan oleh informan buruh perkebunan kelapa sawit yang pernah bekerja di Malaysia:

“Pemutusan hubungan kerja sebenarnya tidak ada dari pihak perusahaan, karena kita ini kan buruh harian lepas, jadi sebenarnya tidak ada ikatan. Buruh lepas ini kan upahnya perminggu, tergantung kita masuknya berapa hari, maka gaji yang kita terima sejumlah dengan hari kita kerja. Karena sekarang masa COVID-19 ini maka kita tidak dapat bekerja, jadi tidak dapat pemasukan”. (Hasil Wawancara 26/9/20).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dikatakan bahwa buruh harian lepas yang bekerja di Malaysia tidak mendapatkan penghasilan sejak pemberlakuan penutupan akses ke Malaysia. Kebijakan ini dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 dari negara Malaysia, sehingga banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai buruh lepas di Malaysia tidak bekerja. *De-urbanisasi* sebagai gejala migrasi horizontal; perpindahan buruh dari kota ke desa akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Buruh yang di-PHK mulai mencari pekerjaan di sektor pertanian (Bremen, 1990). Namun, situasi ini membuat masyarakat menyadari bahwa kekuatan kelompok yang mereka bangun antar sesama buruh menjadi penting, diperkuat dengan budaya lokal mereka yang sudah mengakar, yakni budaya Melayu yang khas.

Kondisi ini memunculkan permasalahan sosial yang berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran, baik itu pengangguran mutlak maupun

pengangguran terselubung. Pekerja yang menjadi buruh harian di Malaysia kemudian terjebak dalam situasi pengangguran dalam kurun waktu yang tidak menentu. Sementara pada pihak lain, pemerintah tidak dapat menjamin adanya bantuan yang bernilai ekonomi secara kontinyu. Menurut Bremen (1990) penggunaan dalam klasifikasi sosial-ekonomi terkait tentang strategi survival yang digunakan oleh buruh pertanian dalam menghadapi krisis, dengan mengklasifikasikan beberapa kriteria rumah tangga berdasarkan kelas sosial. Pengklasifikasian ini dapat merekam “gaya hidup rumah tangga” dan bagaimana gaya hidup itu berubah seiring dengan adanya krisis.

Strategi-strategi bertahan hidup (*survival*) yang dilakukan oleh buruh sangat beragam. Bagi golongan menengah, mereka menggunakan tabungan yang mereka dapat saat kesejahteraan mereka lebih baik, jika tabungan mereka habis mulai menjual barang-barang konsumsi seperti perhiasan emas, televisi, kendaraan bermotor, kipas angin dan lain-lain. Sedangkan, lapisan bawah yang tidak memiliki barang berharga, mereka terpaksa bekerja serabutan meskipun dengan resiko dibayar sangat murah (Bremen, 1986; 1990). Pada masyarakat perbatasan di Sambas, mereka menggunakan kekuatan kelompok untuk saling bahu-membahu memenuhi kebutuhan komunitas mereka. Mereka memiliki falsafah “jangan sampai ada tetangga yang kelaparan”, sehingga mereka saling mendukung untuk bersama-sama menghadapi situasi pandemi ini.

“Asalkan satu hal yang tidak boleh terjadi, jangan sampai ada tetangga kita yang mengalami kelaparan. Kita akan saling mendukung satu sama lain. Senasip dan sepenanggungan kami sebagai masyarakat ini harus kuat. jangan sampai lemah”. (Hasil Wawancara 27/9/20).

Mereka secara komunitas mulai saling melihat, mulai mengurangi jatah makan dari tiga kali menjadi dua kali, menjadi sekali dengan alternatif menggunakan makanan pengganti dari nasi menjadi singkong. Mereka membuat posko komunitas untuk bersama-sama menanam sayur-sayuran, singkong, dan lain-lain, untuk menutupi kebutuhan komunitas mereka. Strategi-strategi yang mereka lakukan bersifat temporer (sementara), para buruh tunakisma mengatasi masa krisis dengan daya tubuh mereka, di sisi lain mulai mengandalkan sistem kekerabatan dengan meminta dan menerima bantuan dari orang sekitar, sanak kerabat dan tetangga dekat. Tentu saja bantuan ini juga tidak bisa diandalkan jika dihadapkan pada kondisi yang sama, yaitu kemiskinan. Akan tetapi, solidaritas kelompok menjadi mekanisme sosial yang digunakan oleh buruh untuk bertahan dari krisis (Bremen, 1990).

Subsistensi Budaya Strategi Survival

Strategi survival buruh untuk tetap bertahan hidup ditengah krisis dengan memanfaatkan mekanisme-mekanisme jaringan sosial didasarkan pada prinsip-prinsip kegotongroyongan sudah mulai dihilangkan, yang tersisa hanya kewajiban membantu tetangga karena adanya ikatan sosial (Bremen, 1988; 1990). Hal ini disebabkan oleh sistem diversifikasi ekonomi pertanian dan meningkatnya orientasi pada dunia luar yang berorientasi pada ekonomi dan modernitas di lingkungan masyarakat desa.

Hubungan sosial yang terjalin antar warga masyarakat di desa perbatasan ini telah termonetisasi sama seperti kehidupan masyarakat kota. Hal ini karena perkembangan wilayah perbatasan yang cukup maju, situasi ini berdampak pada hakekat hubungan sosial yang memiliki ciri kontraktual tertentu, dan transaksi keuangan memainkan peran sentral dalam menata jaringan sosial. Dalam

mekanisme bertahan hidup, masyarakat pedesaan mengandalkan sektor informal, oleh karena itu hubungan sosial menjadi modal dasar untuk membangun keberdayaan.

“Kami bahu membahu satu sama lainnya. Walaupun hidup terbatas apa adanya, kami saling membantu dalam keterbatasan. Ada atau tidak adanya COVID-19 ini sebenarnya kami pun saling bantu membantu antar tetangga, adanya pandemi ini membuat hubungan antar sesama kami semakin kuat”. (Wawancara 26/9/20).

Sektor informal ini menjadi tumpuan buruh tunakisma mendapatkan penghasilan, sebagai pekerja serabutan dilakukan untuk bertahan hidup meskipun hasilnya tidak bisa diandalkan. Bagi masyarakat Melayu di perbatasan Indonesia-Malaysia, mereka mempunyai keyakinan dengan bertahan hidup dan bertumpu pada kekuatan diri sendiri dan komunitas untuk tetap *survive*. Hal ini yang menjadi benang merah bahwa strategi survival mereka cukup unik, yaitu dengan mengandalkan budaya lokal yang notabenehnya sudah lama terkikis, dengan adanya krisis pandemi ini mulai mereka hidupkan kembali.

Budaya Insanak

Secara budaya, subsistensi hidup yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan adalah dengan menjaga dan memperkuat ikatan sosial, dalam bentuk memelihara kekerabatan sebagai kunci utama ikatan sosial. Ungkapan di atas menunjukkan bahwa suasana kekeluargaan atau persaudaraan (*insanak*) menjadi salah satu kunci atau strategi untuk dapat bertahan hidup di dalam suasana bencana atau musibah. Pada masyarakat tradisional, berkumpulnya unsur-unsur persaudaraan sehingga terbentuknya satu kelompok keluarga besar adalah ciri khas yang masih kelihatan. Hal ini masih dipertahankan di daerah perbatasan khususnya di Kecamatan Sambas dan Paloh.

Inilah jaringan sosial internal yang pokok atau utama yang disebut dengan konsep *insanak dakkat* atau *keluarage sedarah*. Konsep *insanak dakkat* merupakan suatu bentuk jaringan sosial ke dalam (lingkungan internal keluarga atau yang masih ada hubungan kekeluargaan sedarah). Para buruh, khususnya buruh migran, pada umumnya ketika mereka bekerja ke Malaysia tidak membawa ikut serta keluarganya (anak dan isteri/suami), melainkan ditinggalkan (dititipkan) untuk hidup bersama dengan keluarga dekat (orang tua, mertua, suami/isteri, dan saudara kandung) yang ada di daerah asalnya. Sehingga berbagai kebutuhan hidup mereka ditanggulangi bersama-sama.

Bahkan lebih jauh, jika mereka di luar negeri belum juga mendapatkan pekerjaan yang layak, atau ada pekerjaan di sana akan tetapi tidak mendapatkan/memberikan penghasilan (gaji/upah) yang memadai, maka segala keperluan hidup keluarga yang ditinggal secara otomatis dipenuhi secara mandiri atau dibantu oleh keluarga dekatnya. Betapa banyak para pekerja di luar negeri itu yang anak-anaknya dijaga, dididik, bahkan dibiayai kehidupannya oleh kakek-neneknya yang ada di desa asalnya.

“Kita yang menjadi buruh di Malaysia ini kan sudah lama, ada yang turun temurun, dari bapaknya, istri dan anak-anaknya pun juga nantinya ikut jadi buruh juga di kebun sawit. Banyak diantara kita ini sudah menganggap saudara dengan buruh lainnya. Jadi, kita bersama-sama susah senang saat perbatasan ditutup dan kita tidak bisa bekerja.” (Hasil Wawancara 27/9/20)

Bentuk lainnya dari konsep *insanak* adalah membangun jaringan sosial ke kalangan eksternal atau di luar keluarga dekat yang disebut dengan *insanak jaoh* atau *keluarage seketurunan*. Yang dimaksud dengan *keluarage seketurunan* adalah semua manusia yang

masuk dalam kategori berasal dari se-daerah, atau seketurunan Nabi Adam a.s. Inilah yang mereka sebut kawan, satu bentuk ikatan sosial yang dilabelisasi oleh lingkup dan latar belakang primordial tertentu seperti karena satu daerah asal di desanya, atau satu suku, satu bangsa (se-tanah air), serta karena se-nasib dan se-perjuangan di tempat be-kerja.

Jaringan sosial semacam ini sangat efektif dalam menumbuhkan solidaritas sosial, dan sangat membantu bagi mereka yang menghadapi masalah kehidupan atau mengalami kesulitan. Dengan terjalannya hubungan pertemanan dan kekerabatan yang lebih luas, maka menjadi modal tambahan untuk dapat “numpang hidup” ketika sedang mengalami situasi sulit karena musibah atau bencana.

Budaya Sinulungan

Konsep ini merupakan wujud dari etika subsistensi atau moral subsistensi; yaitu sikap antusiasme dengan menunjukkan perhatian serta keprihatinan bersama kepada dan untuk sesama dalam bentuk tolong-menolong dengan tanpa pamrih secara materil maupun ekonomis. Konsep ini bagian dari nilai-nilai budaya kekeluargaan dan keagamaan yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu merupakan suatu model kerja sama yang pada umumnya berbentuk pemberian sesuatu yang bersifat sosial dan temporer (instantif), yang disebut juga dengan istilah *banto`-membanto`* (saling membantu).

Beberapa bentuk *sinulungan* yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan khususnya para buruh dalam masa pandemi COVID-19 adalah menyediakan fasilitas transportasi antar-jemput gratis (*numpange`* dan atau *sinumpangan*), terutama perjalanan pulang dari tapal batas (border) menuju ke desa asalnya. Masih berkaitan dengan perjalanan pulang ini, mereka biasanya saling berbagi

rezeki, berupa makanan dan minuman. Atau juga dalam bentuk sedekah dana sedananya (*simbare'an*).

Selain itu mereka juga terkadang melakukan barter barang yang dibawa (*sinukaran*) sebagai oleh-oleh untuk keluarga. Bahkan ketika situasi membutuhkan, mereka melakukan budaya saling meminjamkan sesuatu yang diperlukan (*siminjaman*). Dengan melakukan praktik *sinulungan* ini mereka dapat menemukan jalan keluar dari masalah yang sangat mendesak yang mereka hadapi agar dapat bertahan hidup.

Budaya Begeraeh

Konsep ini merupakan bagian dari bentuk produktivitas subsistensi atau subsistensi produksi, yaitu dengan melakukan usaha apa saja dengan bersusah payah (*begeraeh*) yang penting ada hasilnya untuk dapat digunakan sendiri, atau secara teoritis yaitu mengerjakan sesuatu meskipun nilai dan fungsi dari hasilnya yang tingkat derajat komersialisasi dan monetisasinya rendah. (Bandingkan: Wikipedia: Ekonomi Subsistensi). Masyarakat perbatasan di Kecamatan Sambas dan Paloh, khususnya para buruh yang terdampak kebijakan penjarakan sosial dan penutupan tapal batas, berusaha mencari pekerjaan alternatif, atau pekerjaan tambahan bahkan berbentuk kerja serabutan, yang penting bagi mereka ada hasilnya untuk dipakai sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, beberapa bentuk dan jenis pekerjaan alternatif yang mereka lakukan diantaranya adalah memanfaatkan lahan tidur, lahan pertanian, dan perkebunan untuk ditanami atau juga ditumpang sari dengan berbagai komoditas pangan dan peternakan. Hal ini diungkapkan informan sebagai berikut:

“Lahan-lahan yang ada kami buat menjadi kebun sayur, ada juga tanam singkong dan jagung. Ini nanti hasilnya dibagi-bagi untuk semua masyarakat

disini. Kalau ada lebih, dapat juga kita jual, untuk menambah pemasukan modal dan kita bisa menanam lagi.” (Hasil Wawancara 26/9/20).

Selain itu juga memanfaatkan potensi perairan dan laut dalam bentuk menangkap ikan dan sejenisnya. Pekerjaan serabutan semacam ini tentunya tidak begitu sulit mereka lakukan, karena sudah menjadi budaya turun-temurun dan bahkan sebagian mereka sendiri ada yang pernah mengalami atau melakoninya di masa lalu sebelum menjadi buruh dan atau bekerja ke kota atau ke luar negeri.

Budaya Bekakkar atau Ngakkar

Secara bahasa ia bermakna mengikis atau mengeruk sesuatu. Konsep ini merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan sesuatu yang berharga yang masih dimiliki atau apa saja yang masih ada dan mempunyai nilai secara tunai. Caranya adalah dengan melihat-lihat, dan menimbang-nimbang apa saja yang masih dimiliki dan sekiranya ada nilainya. Bentuknya adalah menjual atau menggadaikan barang-barang yang berharga tersebut. Termasuk yang dijadikan sasaran juga adalah simpanan dana, dengan mengambil tabungan uang yang masih ada tersimpan atau tersisa. Hal ini sangat membantu mereka ketika dalam keadaan mendesak dan harus menanggulangi suatu kebutuhan yang bersifat darurat. Artinya *Bekakkar* atau *Ngakkar* ini adalah bentuk investasi yang dilakukan untuk dapat digunakan pada masa-masa darurat seperti terjadinya pandemi saat ini.

Pada umumnya barang-barang berharga dan tabungan dana itu diperoleh atau bersumber dari hasil mereka bekerja sebagai buruh lepas di Malaysia. Biasanya dalam masa-masa tertentu, ketika ada kelebihan penghasilan di kota atau di Malaysia, mereka mengirimkan sejumlah dana kepada keluarga yang ditinggal di kampung halaman. Kemudian dana ter-

sebut oleh keluarganya, di samping digunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, dibelikan bahkan diinvestasikan dalam bentuk barang-barang berharga dan ada juga yang disimpan sebagai tabungan. Ketika situasi mendesak yang memerlukan biaya untuk pemenuhan kebutuhan pokok hidup sehari-hari maka semua itu *dikakkar* (dikikis habis; dijual, ditukar, atau digadaikan) untuk keperluan darurat, demi memenuhi kebutuhan hidup atau menyelamatkan keberlangsungan hidup.

Budaya Ngareh

Konsep ini hampir sama dengan *ngakkar* (mengikis habis apa yang dimiliki) seperti yang telah dijelaskan di atas. Bedanya, kalau *ngakkar* lebih berorientasi ke dalam (internal) yaitu apa saja yang bernilai yang ada atau yang dimiliki di dalam rumah tangga/keluarga, sedangkan *ngareh* (seperti ayam mengais tanah untuk mencari makanan) adalah mencari sesuatu bernilai di luar selain yang dimiliki di rumah/keluarga. Diantaranya adalah dengan mencari sesuatu yang bernilai, tapi tidak dimanfaatkan oleh orang lain, meminjam atau berhutang, serta mencari peluang untuk mendapatkan bantuan dari luar terutama yang diprogramkan oleh pemerintah.

Sesuatu yang bernilai atau bermanfaat tapi tidak semua orang memanfaatkannya adalah seperti umbu-umbian, dedaunan, buah-buahan dari tanaman hutan dan sebagainya yang tumbuh liar secara alami. Ini juga merupakan bagian dari nostalgia mereka ketika masih di desa pada masa lalu dengan mengkonsumsi hasil lingkungan hidup yang masih bernuansa alami. Bahkan dari aspek kuliner, di kalangan suku Melayu Sambas masih mempertahankan jenis makanan tradisional yang secara historis bernuansakan keprihatinan yaitu *Bubor Paddas*. Filosofi dari kuliner khas daerah ini adalah penyajian makanan yang bersumberkan hasil alam yang dulunya

diolah secara minimalis tapi mengenyangkan.

Ketika usaha di atas juga belum dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak, maka mereka melakukan upaya meminjam barang jenis habis pakai yang disebut *ngganti*. Praktek meminjam atau berhutang dalam konteks budaya mereka tidak mesti berbentuk uang tunai, kadang-kadang lebih banyak dalam bentuk materi atau bahan mentah yang diperlukan secara mendesak untuk dikonsumsi, seperti beras, kopi, gula, garam dan kebutuhan pokok lainnya. Pinjaman konsumtif semacam ini nantinya akan dibayar dengan jenis barang dan takaran yang sama. Hal ini diungkapkan informan sebagai berikut:

“Pinjam meminjam ini sudah biasa kita. Kalau kita kekurangan apa, bisa meminjam ke tetangga yang ada, begitu juga sebaliknya tetangga yang kekurangan apa, kalau kita ada pasti akan dibantu. Ini yang kami sebut ngareh disini, tetap kita junjung tinggi karena ini budaya dari jaman nenek moyang kita jaman dahulu”. (Hasil Wawancara 26/9/20).

Budaya Nganggané' atau Nahanne'

Konsep yang terakhir ini adalah berupa upaya memperkokoh kemandirian dengan mengerahkan kekuatan diri dari dalam. Bentuknya adalah mengekang diri dengan hanya memakai/memakan sesuatu sekedarnya/secukupnya saja (*nganggané'*) atau mengurangi kemauan hanya sebatas apa yang ada saja (*nahanne'*). Dengan kata lain, konsep ini merupakan sikap hidup prihatin yang lebih mendalam dan berdimensi kesengsaraan lahir batin.

Beberapa bentuk implementatif yang dilakukan oleh mereka dari konsep ini adalah dengan mengurangi jatah makan dan meningkatkan daya tahan terhadap kelaparan. Seperti mengubah porsi sarapan yang biasanya lengkap dengan nasi dan ada lauk-pauknya, diganti dengan bubur nasi berperisa asin

saja, atau sarapan hanya dengan umbi-umbian. Hal ini diungkapkan informan sebagai berikut:

“Biasanya makan nasi saat siang sekali makan dan saat malam juga sekali makan saja. Kalau pagi kan biasanya ada yang cukup hanya minum kopi dengan singkong, lalu pas sore juga biasanya minum kopi juga. Minum kopi ini rasanya bikin kenyang juga karena kebiasaan begitu.” (Hasil Wawancara 27/9/20).

Pengurangan porsi makan atau diversifikasi jenis makanan pokok menjadi strategi unik mereka dalam menghadapi situasi pandemi ini. Bentuk lainnya adalah menekan pengeluaran seminimal mungkin yaitu memanfaatkan apa yang ada dan disediakan oleh alam, serta mengupayakan ada sisa yang dapat disimpan untuk waktu nanti atau esok. Bahkan jika memungkinkan disisihkan untuk bisa ditabung atau menjadi cadangan di masa yang lebih lama untuk keberlangsungan komunitas. Bentuk lainnya adalah mengatur masa depan keluarga, seperti menunda berbagai kegiatan kekeluargaan yang memerlukan biaya, termasuk menunda menyekolahkan anak dan membatasi jumlah anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan bahwa strategi masyarakat perbatasan di Kabupaten Sambas agar dapat bertahan hidup (*survive*) yaitu dengan subsistensi, dimana pola dan cara hidup tradisional mulai dihidupkan kembali. Masyarakat ini notabene lebih banyak bekerja sebagai buruh harian lepas di Malaysia, sehingga kebijakan penutupan tapal batas secara langsung berdampak terhadap roda ekonomi mereka. Oleh karena itu, praktik subsistensi budaya yang hidup di masyarakat ini menjadi khas dan unik dan dapat menjadi praktik survival komunitas. Pada dasarnya praktik budaya

mereka ini karena pengaruh agama yang mengakar pada kehidupan masyarakat melayu di Kabupaten Sambas. Semangat gotong royong masyarakat juga menjadi modal sosial lokal yang penting untuk terus dilakukan, terlebih lagi pada masa pandemi yang membutuhkan lebih banyak dukungan kelompok untuk menghadapi situasi ini bersama-sama.

Sumbangsih praktis penelitian ini diantaranya berbentuk masukan dan saran atau rekomendasi yang ditujukan kepada beberapa pihak, terutama secara khusus kepada pemerintah pusat yang hendaknya terus membangun dan mengembangkan perbatasan secara berkelanjutan, terutama penguatan di bidang kesejahteraan dengan menumbuhkan-pertumbuhan pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan yang berbasis budaya. Hal ini agar eksistensi budaya lokal masyarakat perbatasan terus menerus digaungkan sebagai solidaritas bersama, tidak hanya pada masa pandemi, tetapi sepanjang waktu. Kemudian, bagi pemerintah provinsi terkhusus Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang diharapkan terus meningkatkan koordinasi terutama dalam upaya memberikan perlindungan dan memenuhi jaminan kesejahteraan masyarakat perbatasan khususnya para buruh migran agar wibawa negara tetap terjaga. Pada masa pandemi ini, jaminan kesehatan masyarakat juga sangat diperlukan, sehingga pusat layanan kesehatan di perbatasan harus terjamin.

Kepada pemerintah Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah perbatasan jalur darat, diharapkan mampu mendorong pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa agar berperan aktif mempertahankan budaya dan agama, sehingga mengelola potensi keduanya sebagai bentuk modal ketahanan sosial dan ekonomi lokal. Seluruh masyarakat desa dan RT/RW agar selalu proaktif saling mengingatkan dalam

melaksanakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh masyarakat perbatasan di Kabupaten Sambas yang terlibat dalam penelitian ini, baik yang memberikan data primer berupa waktu untuk wawancara, maupun yang meluangkan tenaga dan pikiran dalam mengakomodasi kami selama masa penelitian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang memberikan rekomendasi tim kami melakukan penelitian tentang COVID-19 dan Masyarakat Perbatasan. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News Kalbar. (2020). Ekonomi masyarakat perbatasan Kalbar semakin tertekan dampak Covid-19. Retrieved from: <https://kalbar.antaranews.com/berita/410946/ekonomi-masyarakat-perbatasan-kalbar-semakin-tertekan-dampak-covid-19>
- Anwar, D. (2002). Kamus lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Amelia.
- Atem & Niko, N. (2020). Persoalan kerawanan pangan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia). *Jurnal Surya Masyarakat*. Vol. 2, No. 2, 94-104. DOI: <https://doi.org/10.26714/jsm.2.2.2020.94-104>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. (2017). Kabupaten sambas dalam angka 2017. Sambas: BPS Kabupaten Sambas.
- Bradley, C., Moore, C. C., Burton, M. L., & White, D. R. (1990). A cross-cultural historical analysis of subsistence change. *American Anthropologist*. 92(2): 447-457. DOI: 10.1525/aa.1990.92.2.02a00120
- Breman, J. (1990). Labour migration and rural transformation in colonial Asia. Amsterdam: Free University press.
- Breman, J. (Ed). (1988). The shattered image: construction and deconstruction of the village in colonial Asia. Dordrecht-Holand/Providence RI-USA: Foris Publication.
- Bremen, J. (1986). Penguasaan tanah dan tenaga kerja: Jawa di masa kolonial. Jakarta: LP3ES.
- Bremen, J., & Windradi, G. (2002). Masa cerah dan masa suram pedesaan Jawa: studi kasus di dua desa menjelang akhir abad ke-20. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, J. W. (2010). Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1992). Tafsir kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.
- Geertz, C. (1982). Keluarga Jawa. Jakarta: Grafiti Press.
- Hadi, S. (2017). Strategi dan kebijakan percepatan pembangunan daerah perbatasan melalui pengembangan investasi kawasan perbatasan pada daerah tertinggal. Bogor: Kementerian Desa PDTT.
- Marzali, A. (2003). Strategi peasant cikalong dalam menghadapi kemiskinan. Jakarta: Yayasan Obor.
- Niko, N. (2017). Fenomena trafficking in person di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. *RAHEEMA: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4(1):32-37.
- Niko, N. (2021). Poor and hunger: how do indigenous peoples' respond to COVID-19 in Indonesia. *Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences)*.

- 14(1) 81-92. DOI: <https://doi.org/10.14456/jcdr-hs.2021.8>
- Niko, N., & Samkamaria. (2019). Terminal Barang Internasional (TBI) dalam konteks pembangunan ekonomi masyarakat di perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 1(2):104-114.
- Okezone.com. (2020). Pintu perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar resmi ditutup. Retrieved from: <https://megapolitan.okezone.com/read/2020/03/18/338/2185272/3-pintu-perbatasan-indonesia-malaysia-di-kalbar-resmi-ditutup>
- Pontianak Post. (2020). Midji tolak pemulangan TKI lewat Kalbar dan ancam kembalikan ke Malaysia. Retrieved from: <https://pontianakpost.co.id/midji-tolak-pemulangan-tki-lewat-kalbar-dan-ancam-kembalikan-ke-malaysia/>
- Ritzer, G. (2012). Teori sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rupita. (2021). Pemanfaatan modal sosial lokal dalam menghadapi pandemi COVID-19. *Jurnal Neo Societal*. 6(1) 46-55.
- Sahryzal. (1996). Strategi buruh perkebunan mengatasi kemiskinan. studi di perkebunan Teh Mitra Kerinci di Desa Sungai Lambai Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Sumatra Barat. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada.
- Scott, J. (1981). Moral ekonomi petani: pergolakan dan subsistensi di Asia Tenggara. Jakarta: LP3ES.
- Suharto, E. (2009). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial & pekerjaan sosial. Cetakan Ketiga. Bandung: PT. Refika Aditama.